

Redaksi:

Edi Cahyono, Maxim
Napitupulu, Maulana
Mahendra, Muhammad
Husni Thamrin, Hemasari
Dharmabumi

Diterbitkan oleh:
Yayasan Penebar

pEnEbar e-news terbit sebagai media pertukaran dan perdebatan soal-soal perburuhan dan globalisasi. Kami mendukung gerak anti-globalisasi masyarakat Indonesia. Globalisasi dan perdagangan bebas merupakan jebakan negeri-negeri imperialis untuk menjadikan negeri-negeri miskin terus menjadi koloni dan dihisap oleh negeri-negeri maju. Kami menerima tulisan-tulisan yang sejalan dengan misi kami untuk dimasukkan dan diedarkan melalui e-news ini.

Suara SBKA:

Media Pendidikan Politik Untuk Buruh *Edi Cahyono*



Pengantar

Sejak awal abad XX media massa berbentuk surat-kabar, buletin, majalah, tabloid adalah alat penting untuk menggalang kekuatan rakyat, maupun anggota suatu organisasi di Indonesia (Hindia-Belanda). Media massa tidak sekedar alat penyampaian informasi namun untuk ajang berdebat pula.

Para aktivis di awal abad XX pun menggalang kekuatan rakyat untuk menentang kolonialisme-kapitalisme-imperialisme. Tidak sedikit media massa terbit dalam rangka pendidikan demi membangunkan kekuatan rakyat tersebut. Kelompok-kelompok Islam, komunis, nasionalis memiliki terbitan-terbitannya sendiri. Beberapa judul yang dapat disebutkan adalah di Semarang: *Sinar Hindia*; *Soeara Ra'jat*; *Si Tetap*; dan *Barisan Moeda*; di Surakarta (Solo) antara lain *Islam Bergerak*; *Medan Moeslimin*; *Persatuan Ra'jat Senopati*; dan *Hobromarkoto Mowo*; di Su-rabaya ada *Proletar*, di Yogyakarta terkenal dengan *Kromo Mardiko* dan di Bandung dengan *Matahari*; *Mataram*, *Soerapati* dan *Titar*; di Jakarta ada *Njala* dan *Kijahi Djagoer*. Dalam baha-sa Mas Marco Kartodikromo, saat pergerakan masih berusia muda, di tahun 1918:

“kita memberi ingat kepada saudara-saudara, djanganlah soeka membatja sembarang soerat kabar, pilihlah soerat kabar jang betoel-betoel memihak

kepada kamoe orang, tetapi jang tidak memihak kepada kaoem oeng Sebab kalau tidak begitoe, soedah boleh ditentoean, achirnja kita orang Hindia tentoe akan terdjeroemoes di dalam lobang kesengsara'an jang amat hina sekali."¹

Sedang Moeso memberi penjelasan cukup tajam tentang peranan berbagai terbitan tersebut:

"Kaoem tertindas disini haroeslah membatja boekoe-boekoenja sendiri jang ditoelis oleh orang-orang dari klasnja sendiri. Begitoealah klas jang tertindas, disini nanti djadi insjaf betoel akan nasibnja.

Apabila pikiran klas jang tertindas lepas dari pengaroeh klas kapital, akan lekaslah ia mengoeatkan barisannja dan akan lekas djoega ia menggalang barisannja oentoeok mere-boet apa jang dipandangnja baik bagi diri sendiri.

Apakah jang dipandang baik oleh klas jang tertindas selain djatoehnja kapital, karena djatoehnja kapital menimboelkan kommoenisme, jaitoe doenia jang selamat itoe, dimana se-moea pendoedoek negeri bisa hidoep roekoen bersaudara'an dengan tidak kekoerangan sesoeatoe apa.

Oentoeok mentjepatkan datangnja kemerdekaan kita, haroeslah sekalian saudara membatja boekoe-boekoenja sendiri, jang ditoelis oleh orang-orang dari klasnja sendiri.

Klas jang tertindas haroes menerbitkan boekoe-boekoe jang perloe dalam pertandingan melawan kapital."²

Nama-nama tokoh yang aktif melakukan perlawanan dan juga menulis antara lain adalah R.A. Siti Soendari, R. Oemar Said Tjokroaminoto, Mas Marco Kartodikromo, Semaoen, R.M. Soewardi Soerjaningrat, R.M. Soerjopranoto, R.P. Sosrokardono, Hadji

¹ Marco, "Djangan Takoet," *Sinar Djawa*, Kamis 11 April 1918, No. 82.

² Moeso, "Boekoe-Boekoenja Sendiri, pikiran-pikiran sendiri, Moraal Sendiri," *Proletar*, 23 Juli 1925, nomer 87 tahoen ke 43.

Misbach, dan masih banyak lagi.

Tahun 1920an merupakan masa membanjirnya terbitan rakyat, saat itu ruang politik 'demokratis' terbuka bagi rakyat. Dalam Kongres PKI tahun 1924, PKI membentuk *Kommissi Batjaan Hoofdbestuur PKI*. Komisi ini menerbitkan dan me-nyebarluaskan tulisan-tulisan serta terjemahan-terjemahan 'literatuur socialisme'-istilah ini dipahami oleh orang-orang pergerakan sebagai bacaan-bacaan guna menentang terbitan dan penyebarluasan bacaan-bacaan kaum modal. Semaoen adalah orang yang pertama kali memperkenalkan pengertian 'literatuur socialistisch.' Tujuan memilih, menerbitkan dan penyebarluaskan tulisan yang mengajarkan socialisme adalah: *Pertama*, untuk menghapuskan hubungan-hubungan sosial lama-yang telah usang yang tetap dipertahankan oleh keku-asaan kolonial-seperti aturan sembah jongkok ketika bertemu dengan pejabat atau pembesar kolonial. *Kedua*, 'literatuur socialisme' merupakan oposisi melawan dominasi penerbitan barang-cetakan yang diproduksi oleh *Balai Poestaka* (BP). Dengan kata lain, di atas pentas politik pergerakan, 'literatuur socialisme' merupakan 'otak' dari gerakan massa. Dengan produksi bacaan tersebut, rakyat jajahan diperkenalkan dan diajak masuk ke dalam pikiran-pikiran baru yang modern, dan karena itulah 'literatuur socialisme' harus ditulis dengan baha-sa yang dipahami oleh kaum *kromo*.

Tokoh dan bacaan (terbitan) telah membawa banyak kaum pergerakan diseret ke dalam bui oleh pemerintah kolonial disebabkan suara (tulisan) mereka yang terlalu 'keras.' Untuk lingkungan keluarga sang tokoh belum tentu mereka mengizinkan kerabatnya melakukan aktivitas politik 'keras' tersebut. Siti Soendari, misalnya, dia disingkirkan oleh ayahnya sendiri ke Negeri Belanda, untuk menghindarkan anaknya dijeblos-kan ke dalam bui. Namun, banyak tokoh pergerakan lain yang rela mendekam di penjara demi 'satunya perkataan dengan tindakan.' Penjara menjadi 'rumah kedua.' Mereka adalah orang-orang yang sangat berani membuka kedok dari tata-kuasa negara kolonial ke khalayak ramai. Biasanya para aktivis tersebut dijerumuskan

melalui *pers-delict* yang dianggap mengganggu *rust en orde* kolonial. Mas Marco Kartodikromo, misalnya, empat kali dijebloskan ke penjara dengan *pers-delict* tersebut. Marco telah menjadi radikal sejak 1914. Soewardi Soerjaningrat menganggap orang seperti Mas Marco adalah seorang satria sejati. Dalam surat kabar *Sarotomo* tahun 1915 Soewardi menuliskan:

“Memang membela bangsa itu tidak mudah dan tidak menyenangkan, namun ini kewajiban kita. Janganlah kita mudah berputus asa. Entah berapa besarnya pengorbanan yang dituntut dari diri kita, kita wajib mengorbankan diri bila perlu. Inilah kewajiban kita yang membahagiakan. Janganlah berkecil hati. Masih ada sepuluh korban calon satria yang memiliki keberanian melawan *buta*... Ingatkah, yang berbahagia bukanlah mereka yang menyandang gelar dan pangkat, bagi saya, kebahagiaan yang paling besar berada dalam pikiran saya. Dengan delik pers ini, saudara telah mengorbankan diri dan semua hukuman sesungguhnya merupakan sebuah bintang kehormatan bagi saudara dan itulah lambang kebahagiaan saudara. Sekarang, di mata saya pangkat saudara sangat tinggi, karena sudah jelas, kebahagiaan saudara terletak dalam upaya membela bangsa. Janganlah mengira bahwa tak ada orang lain yang akan meneruskan pekerjaan saudara. Puluhan orang nanti akan menggantikan saudara. Dengan delik pers ini, justru banyak orang akan memasuki medan pergerakan kita. Berani karena benar.”³

Waktu berlalu cepat. Kekuatan politik mengalami pasang-surutnya. Ada penindasan politik besar oleh Pemerintah Hindia-Belanda di akhir tahun 1926 dan awal 1927 terhadap rakyat yang melakukan pemberontakan. Terjadi krisis ekonomi tahun 1930-an. Dilanjutkan dengan Perang Dunia II, di mana Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Berlanjut dengan bala tentara Jepang dapat mengambil alih Hindia Belanda dari tangan Belanda pada tahun

³ Takashi Siraishi, “Satria VS Pandita Sebuah Debat Dalam Mencari Identitas,” dalam Akira Nagazumi dan Taufik Abdullah (eds.) *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang*, Yayasan Obor, Jakarta, 1986, hal.: 183.

1942. Selang tidak lama kemudian kaum bumiputera berinisiatif melakukan Pro-klamasi 17 Agustus 1945. Kurun pasca Proklamasi merupa-kan saat-saat pembentukan kedaulatan, dan pula proses pen-jajakan agar diakui menjadi bangsa baru yang merdeka. Banyak sekali inisiatif rakyat untuk menampilkan kehidupan politik yang mandiri dari sebuah bangsa baru. Berikut--secara khusus--akan dibahas peran dari sebuah media yang dimiliki serikat buruh pada masa awal berdirinya Negara Indonesia: *Suara SBKA*.

Suara SBKA

Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) dibentuk 13 Maret 1946. SBKA adalah serikat buruh *onderbow* SOBSI. Dalam tahun 1950 SBKA menerbitkan *Suara SBKA*. *Suara SBKA* terbit dua kali sebulan, dicetak oleh DPP SBKA dengan alamat redaksi - administrasi: Jalan Manggarai Utara 1, Jakarta.

Suara SBKA menampilkan berita-berita antara lain: kegiatan SOBSI, informasi tentang hak-hak buruh (hak libur pada hari raya, hak mogok, jam kerja, jaminan keamanan kerja), keanggotaan SBKA, dan rubrik-rubrik: dari redaksi, tadjuk-rentjana, berita daerah, berita luar negeri, inilah artinya, sudut gerbong.

Fungsi *Suara SBKA*, sebagaimana diputuskan dalam Sidang Dewan Pusat Pleno ke II SBKA, adalah:

- a. mendjelaskan tugas politik dan organisasi daripada SBKA;
- b. meninggikan kwalitet kader dalam melaksanakan tugas politik dan organisasi daripada SBKA;
- c. mengupas atau menganalise soal² nasional dan keorganisasian setjara umum jang dihadapi oleh SBKA;
- d. memberi tuntunan dalam memenangkan aksi² SBKA dan kesatuanaksi²;
- e. mempopulerkan SOBSI dan GSS [Gerakan Serikat Sekerdja];
- f. mempopulerkan pengalaman² serikatburuh lain jang dapat didjadikan sebagai teladan;
- g. mempolulerkan tulisan² *Bendera Buruh*.⁴

Pendidikan politik, jelas, menjadi tujuan utama dari terbitan ini. Hal itu sudah lumrah jika kita lihat perkembangan penerbitan bumiputera Indonesia (Hindia-Belanda) sejak tahun belasan abad XX. Politik menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat luas.

Melalui pendidikan politik yang disampaikan menggunakan *Suara SBKA* ini, muncul sikap dari sosok serikat buruh sejati. Hal ini tercermin, misalnya, melalui pembuktian terhadap apa yang disebut sebagai "Serikat Buruh Gadungan" (*yellow unions*), yang menjadi sebutan dari aktivitas Kusna Puradire-dja (Ketua Umum PB PBKA):

Pertama, siapa njang menolak fusi antara SBKA dan PBKA? Atau dengan kata lain, siapa njang tidak menghendaki persatuan dikalangan buruh keretaapi? Bukankah njang menggagalkan fusi dan njang anti persatuan itu tuan émér Kusna Puradiredja, Ketua Umum PB PBKA?

Kedua, siapapun tahu kalo Amerika Serikat itu adalah negara imperialis. Bahkan negara imperialis njang terkuat di dunia. Tapi djuga djangan dilupakan bahwa imperialisme sekarang ini sudah sekarat, sudah menghadapi adjalnja. Siapa orangnya diantara "pemimpin²" PBKA njang "beramahtamah" (ehm, ehm) dengan wakil Presiden Amerika Serikat, Nixon waktu berkundjung ke Indonesia? Bukankah orang itu tuan emer Kusna Puradiredja, Ketua Umum PB PBKA-KBSI?

Ketiga, bukankah kita semua sudah tahu, bahwa "aksi mogok" PBKA-KBSI sudah mengakui hadir dalam "rapat rahasia" njang diselenggarakan oleh suatu organisasi warganegara asing njang menamakan dirinja "American Club" bertempat di ruangan "Troika" hotel Des 'Indes di Djakarta? Untuk djelasnja harap sobat² Bang Mihun batja berita di halaman omslah belakang dari nomor ini.

⁴ Rubrik "Dari Redaksi," *Suara SBKA*, no. 29, Thn. V, Maret 1955.

Kelima, tidakkah kita semua sudah tahu, bahwa PBKA berdiri djustru didaerah pendudukan Belanda?

Sekarang dengan SBKA. Kiranja sudah tjukup djelas bagaimana sepak-terdjang SBKA. SBKA adalah pewaris njang sah daripada perdjoangan buruh keretaapi sedjak tahun 1905. Karena SBKA berdjoang untuk persatuan, berdjoang untuk kemerdekaan nasional njang penuh, ini berarti bahwa SBKA itu anti-pendjadjahan, maka kaim imperialis, terutama imperialis Belanda, bentji pada SBKA. Sampai-sampai SBKA ditjap "komunis." Dan oleh sebab itu maka SBKA pada waktu pendudukan Belanda praktis tidak bisa berdjoang setjara legal.

KESIMPULAN

Achirnja Bang Mihun tidak bisa menjalahkan, andaikata ada sobat Bang Mihun njang ambil kesimpulan: Kalo begitu, ja PBKA-KBSI itu njang dimaksud oleh Presiden Sukarno sebagai "sarekatburuh gadungan"!⁵

Di mata buruh pun, nampaknya ada kebutuhan untuk lebih memilih SBKA ketimbang PBKA (ini adalah dua organisasi buruh di lingkungan Djawatan Kereta Api-DKA). Suatu surat pembaca bertajuk "Apa Sebab Saja Memasuki SBKA dan Bukan PBKA" menjelaskan:

Organisasi PBKA ada memunjai satu perusahaan jang dinamakan Badan Sosial Pusat (B.S.P). Dengan demikian anggota²-nja boleh sesuka hati mengambil sesuatu jang dikehendaki biar berupa barang ataupun berupa uang, asal sadja kuat untuk membajarnja bersama bunganja (11%).

Setengah kawan² tidak mengerti apakah itu B.S.P. rupanja ada udang dibalik batu bung!!!

Dengan kedjadian² jang djelas dan bukti² jang njata, maka hati saja dengan sendirinja mendjauhi hal jang tersebut diatas. Dan dengan kesimpulan² jang tegas, kemudian saja

⁵ Rubrik "Sudut Gerbong," *Suara SBKA*, no. 37, thn. V Nopember 1955, hal. 19.

menggabungkan diri menjadi anggota SBKA yang tidak nampak tjtjadnja, seperti PBKA!

Tak lama kemudian sdr² kartu keanggotaan saja telah keluar, dan sebagai pertjobaan, kemudian saja membuat sehelai surat ditunjukkan kepada BPT SBKA Padang menjatakan minta diperdjoeangkan keangkatan saja dari gadji harian menjadi gadji-bulanan.

Dengan perdjoeangan DPT [Dewan Pimpinan Tjabang] dan DPD [Dewan Pimpinan Daerah] SBKA yang tak putus²nja, maka Alhamdulillah sdr.², nasib saja sekarang sudah berubah, dan mulai bulan April 1955 saja diangkat djadi PGS/PGP, terus menbadap besluit sekali.

Menurut keterangan yang saja dapati, ada kira² 175 orang buruh kereta api di ESB telah diangkat kedjabatan P.G.P.

Beginilah kepertjajaan saja terhadap SBKA semakin tebal."⁶

Bentuk lain dari pendidikan politik yang disampaikan melalui *Suara SBKA* ialah pertimbangan-pertimbangan yang diajukan saat menjelang Pemilihan Umum I. Tokoh-tokoh mana yang telah dikenal buruh, apa sumbangan tokoh tersebut terhadap buruh, dan partai apa yang mencalonkan tokoh tersebut sebagai wakil buruh. Sehingga sikap yang ditawarkan kepada buruh-buruh adalah: "PILIHLAH PARTAI ATAU ORANG JANG BENAR² MEMPERDJOANGKAN KEPENTINGAN-KEPENTINGAN KAUMBURUH."⁷

"Inilah Artinja"

Rubrik yang tidak dapat diabaikan dalam memberi pendidikan politik buruh KA adalah "inilah artinja." Rubrik ini berisi penjelasan sederhana berikut contoh apa yang dimaksud dengan pengertian kata dan istilah tertentu. Salah satu misal:

⁶ A. Azis (pegawai Stasiun Padang), "Apa Sebab Saja Memasuki SBKA dan Bukan PBKA," *Suara SBKA*, no. 39, thn. V Djanuari 1955, hal. 18-19.

⁷ *Suara SBKA*, no. 25, thn. V Djanuari 1955, hal. 18.

Boycot: (batja: boikot; djuga sering diutjapkan: békot) = dengan sengadja tidak menghiraukan. Aksi memboycot: tjonto: dalam bulan Agustus 1950 SBKA pernah mengadakan aksi mem-boycot pengangkutan hasil² perkebunan, milik A.L.S. = artinya: SBKA tidak mau mengangkut hasil perkebunan milik A.L.S. jaitu untuk memperkuat tuntutan SARBUPRI kepada madjikan A.L.S. mengenai perbaikan nasib. Demikian djuga dalam bulan September 1950 SBKA memboycot pengiriman rokok dan bahan² lainnya asal dan untuk pabrik rokok B.A.T. dengan maksud untuk memperkuat tuntutan Sarekat Buruh Rokok Indonesia (SBRI) Tjirebon kepada madjikan B.A.T., djuga mengenai perbaikan nasib.⁸

Ada banjak istilah dimasukkan dalam "inilah artinja." Seperti: "klas burdjuis ketjil," "Bureaucratie," "Campagne," "Coalitie," "Collaborator," "Conflict," "Contradictie," "Democratie," dan sebagainya. Banyak istilah ditulis dalam bahasa Inggris atau Belanda atau lainnya sesuai tempat asal kelahiran istilah tersebut. Kemudian diberi penjelasan bagaimana membacanya, di dalam kurung. Disusul dengan penjelasan makna dan contoh aktivitas kongkritnya yang dapat ditemui di Indonesia. Namun, tidak semua istilah diberi contoh kongkrit. Kemungkinan disebabkan masih ada keterbatasan penulisnya dalam memberikan contoh.

Pemaparan dengan menggunakan contoh menjadikan pembaca dapat mengerti makna yang terkandung dalam berbagai istilah. Buruh menjadi tidak buta politik.

Pemahaman tentang Penindasan

Pemahaman para penulis Suara SBKA terhadap penghisapan dan penindasan kapitalis masih terbatas pada hak-hak buruh yang tidak diberikan. Artinya, mereka-para penulis tersebut-belum memahami apa yang sebenarnya menjadi kunci keti-dakadilan dalam masyarakat kapitalis: penghisapan nilai-lebih (*surplus-value*).

⁸ Rubrik "inilah artinja," *Suara SBKA*, no. 24, thn. V Djanuari 1955, hal. 19.

Sebuah artikel bertajuk "Super Exploitasi," mungkin, dapat mewakili sikap dan pemahaman SBKA terhadap penindasan.

1. Formasi pegawai tidak didasarkan kepada kebutuhan yang nyata, yang ini berakibat: a. masih banyaknya pegawai yang mengerjakan jabatan lebih tinggi daripada pangkatnya. b. jumlah jam kerja yang lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. c. adanya sistem dinas yang terputus-putus. d. istirahat diluar tempat bagi treinpersonil tidak dihitung jam kerja. e. masih adanya sistem Annemerij. f. dipachterkannya perusahaan Restorasi.
2. Formasi pegawai berdasarkan kepada anggaran yang kurang menurut kebutuhan, yang ini berakibat: a. pembekuan pengangkatan dan kenaikan pangkat pegawai. b. pembekuan pengangkatan pekerdja harian untuk menjadi pegawai tetap.
3. Upah yang diterima oleh kaum buruh dibawah kebutuhan yang minimum untuk beaja hidupnya sekeluarga.
4. Pembangunan material di D.K.A. tidak sejalan dengan pemeliharaan tenaga kerja, hal ini dihubungkan dengan adanya pemesanan lok² dan kereta² baru dari luarnegeri. Seharusnya modernisasi alat² kerja sejalan dengan kenaikan upah kaum buruh.
5. Belum adanya penghargaan terhadap tenaga teknis, artinya upah dari kaum teknis disamakan dengan upah dari pegawai² yang lain, seperti dari administrasi.
6. Kenaikan pangkat (tingkat) pegawai, didahului dengan ujian dinas yang sangat berat dan sukar diikuti, sehingga hal ini menghambat kenaikan pangkat.
7. Tidak dibajarkannya tundjangan bagi pegawai yang telah lulus ujian dinas.
8. Masih sangat banyaknya pekerdja² harian dengan upah yang sangat rendah dan tidak menerima tundjangan².
9. Belum dan tidak adanya djaminan pemeliharaan kesehatan yang sempurna ditempat-tempat pekerdjaan, se-

- perti di bengkel², didepo², stasiun² dan dihalte-halte jang berdjauhan dari tempat jang ada Dokter atau Rumah Sakit.
10. Untuk Tukang Rem dan Pegawai Restorasi tidak diberikan uang premie KM.
 11. Uang menginap dan uang djalan jang biasa disebut "uang makan" tidak mentjukupi untuk biaja kebutuhan didalam perdjalananan dinas.
 12. Adanja sifat pekerdjaan jang tidak mengingat ukuran kemampuan tenaga manusia (pekerdjaan berat jang mempergunakan tenaga manusia).⁹

Nampaknya, SBKA masih lemah untuk memahami penghisapan kapitalistik. Misalnya, Soebakir Hs., Sekretaris Umum/Sekretaris Sosek [Sosial-Ekonomi] DPP SBKA, hanya mampu menduga (*signalement*) bahwa telah terjadi Balans Palsu/pembukuan *double*-tentang kerugian sebesar Rp. 31.000,- yang diberikan kepada Panitia Enquete-dalam laporan DSM Sumatera Utara.¹⁰

Namun penindasan politik lebih mengkedepan dalam pengutaraan terbitan ini. Misalnya, Njono, Sekretaris Jendral Dewan Nasional SOBSI, menyatakan:

Adalah mendjadi soal jang urgen bagi kaum buruh untuk menuntut supaya larangan demonstrasi ditjabut dan supaya tindakan² lokal daripada aparat² pemerintah setempat jang mengurangi hak demokrasi dan kebebasan serikat-buruh segera dibatalkan. Untuk ini, maka kesatuan-aksi perlu digalang lebih luas dan lebih erat.¹¹

⁹ Mohd. Djatar Sutan Besar, "Super Exploitasi," *Suara SBKA*, no. 24, thn. V Djanuari 1955, Artikel tersebut ditulis berangkat dari akan dilaku-kannya rasionalisasi di Djawatan Kereta Api. Dalam tahun 1954 s/d 1959 akan diberhentikan pegawai sebanyak 7.826 orang (sekitar 10 per-sen), didasarkan pada surat KDKA, No. Rah. 5460/54 tanggal 16 Septem-ber 1954.

¹⁰ "D.S.M. Meberikan Balans Palsu," *Suara SBKA*, no. 25, thn. V Djanuari 1955, hal. 10-11.

¹¹ "Seruan Dewan Nasional SOBSI: Bersatu dan Bersama-sama Merajakan Hari 1 Mei 1955," *Suara SBKA*, no. 28, thn. V Maret 1955, hal. 5.

Pertimbangan Njono adalah, perkembangan dalam tahun-tahun belakangan pemerintah mulai menunjukkan sikap konservatif dengan membatasi kebebasan berbicara seperti: pembatasan rapat, larangan membawa poster dan slogan, pembatasan berpidato dan larangan berdemonstrasi. Pembatasan-pembatasan tersebut akan memandulkan kemampuan buruh untuk memperjuangkan perbaikan nasibnya.¹²

Tentang Pemogokan

SBKA sangat mempertimbangkan aksi-aksi yang akan dilakukannya. Pertimbangan matang membuat SBKA tidak gegabah untuk melakukan suatu pemogokan. Misalnya, mereka segera membatalkan pemogokan 3.000 buruh kereta api dan telpon DSM Sumatera Utara yang direncanakan dilakukan tanggal 17 Januari 1955. Untuk tuntutan gratifikasi tahun 1953 sebanyak 2 bulan upah pokok. Setelah ada putusan mengikat dari P4 Pusat tanggal 8 Januari 1953.¹³ Sebab dalam putusan tersebut P4 Pusat mewajibkan kepada pengusaha memberikan tambahan-tambahan pembayaran tahun 1953 sejumlah dua bulan upah pokok.

Sikap SBKA terhadap mogok, sebagaimana diutarakan Soepandi (Sekretaris Umum II DPP SBKA) dalam resepsi ulang tahun ke IX SBKA di Jakarta, adalah:

Mungkin timbul pertanyaan: SBKA menjatakan menjokong Pemerintah tetapi mengapa SBKA memimpin pemogokan².

Apakah ini tidak melemahkan pemerintah?

Menurut pendapat SBKA, pemogokan tidak bisa dibikin-bikin. Pemogokan itu adalah kelanjutan dari perkembangan sesuatu persoalan dalam kalangan buruh sendiri.

[.....]

pimpinan dapat berusaha menghalang-halangi pemogokan,

¹² *Ibid.*

¹³ *Suara SBKA*, no. 25, thn. V Maret 1955, hal. 10.

tetapi kalau memang ada persoalan yang mengharuskan buruh melakukan pemogokan, buruh akan mogok sendiri meskipun pemogokan itu tidak diatur. Karena itu kalau SBKA memimpin pemogokan hakekatnya hanyalah mengatur tetapi tidak membikin-bikin. Disamping itu SBKA berpengertian bahwa jujur karena buruh menjokong Pemerintah, maka tidak semestinya membiarkan kalau mengetahui Pemerintah bertindak salah, berarti membiarkan Pemerintah kehilangan kepertajaan dari rakyat dan dengan demikian sama artinya dengan membiarkan Pemerintah memperlemah kedudukannya. Itulah sebabnya maka SBKA meskipun menjokong Pemerintah tetap juga memimpin aksi² ringan sampai pun yang berat.¹⁴

Sikap tegas sebagai 'penjaga gawang' dari kemungkinan kesalahan yang akan dilakukan oleh pemerintah ini terus dikumandangkan dan diulang-ulang dari waktu ke waktu. Sikap ini ditunjukkan, misalnya, dengan mengorganisir pemogokan ketika dilakukan peng-yayaan-an Pusat Bengkel Motor (PBM)-DKA [Djawatan Kereta Api] oleh Menteri Perhubungan, Dr. A.K. Gani. Aksi koreksi yang ditujukan kepada pemerintah tersebut untuk menangkal lebih lanjut tindakan likuidasi berbagai perusahaan negara (jawatan negara).¹⁵

Di sisi lain SBKA justru menolak melakukan pemogokan, atau justru menggagalkan aksi yang dilancarkan serikat buruh lain terhadap akan dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika. Argumen SBKA adalah: konferensi tersebut dapat menjadi pukulan besar bagi imperialisme.¹⁶

Sikap anti imperialisme dari SBKA cukup kuat. Begitu pula anti burjuis nasional--seperti terungkap melalui penolakan mereka terhadap peng-yayaan-an PBM, yang dapat diartikan sebagai anti

¹⁴ "Tradisi Buruh Kereta Api, Garis Perjuangan dan Beberapa Sikap S.B.K.A.," *Suara SBKA*, no. 29, thn. V Maret 1955, hal. 6-7.

¹⁵ "SBKA Menentang Aksi KBSI/PBKA," *Suara SBKA*, no. 31, thn. V April 1955, hal. 3.

¹⁶ *Ibid.*

pembentukan burjuasi nasional. SBKA berkembang menjadi semakin revolusioner dalam tahun-tahun selanjutnya:

“pengalaman² dan peladjaran² dari praktek pekerdjaan kita dalam tahun jll. [jang lalu-lalu], selain diharapkan bisa kita pergunakan untuk mentjapai hasil² jang lebih madju dilapangan organisasi dan perbaikan nasib kaum buruh, djuga di-masa² jang mendjelang, kita kaum buruh kereta api betul² bisa mengembalikan tradisinja jang revolusioner, bisa betul² mendasarkan semua aktivitet organisasinja pada aksi² massa. Untuk itu, perlu lebih dipelihara tjara² kerdja jang lebih mendjamin demokrasi dalam Serikatburuh dengan lebih menghidupkan kolektivitet dikalangan massa melalui diskusi² groep ranting² dan regu² untuk lebih memelihara persatuan kaum buruh kereta api [...] Dalam pemilihan umum jll., kaum buruh kereta api jang terdiri dari bermatjam² aliran dan kejakinannja, telah berhasil memenangkan partai² dan golongan² demokratis [...]

Achirnja DPP SBKA menjerukan kepada segenap anggota² SBKA, kaum buruh kereta api dan segenap instansi² organisasi bawahan, dengan segala kesanggupan dan kesegaran tenaga baru jang penuh militansi dan diliputi suasana jang gembira, melangkah madju madju kedepan untuk mentjapai hasil² jang lebih menguntungkan.”¹⁷

Ke mana arah politik SBKA? Mungkin hal ini dapat terjelas-kan melalui kalimat-kalimat dalam sebuah “Tadjukrentjana” yang mengatakan:

“SBKA adalah suatu organisasi jang mendasarkan sikap dan tindakannya pada kekuatan massa. Ini berarti bahwa sikap demikian adalah memang sikap dari massa itu sendiri. SBKA berpendirian bahwa kepentingan kaum buruh kereta-api tidak bisa di-pisah²kan dengan kepentingan golongan² rakjat

¹⁷ Singgih (Sekretaris Umum I DPP SBKA), “Pesan Tahun Baru: Meme-lihara persatuan adalah tugas jang menggembirakan,” Tadjukrentjana *Sua-ra SBKA*, no. 39, thn. V Djanuari 1956, hal. 5.

lainja. Ini berarti bahwa diambilja sikap itu sudah dengan mempertimbangkan tersangkutnja kepentingan golongan² lain. SBKA berpendapat bahwa perdjjuangan kaum buruh tidak bisa di-pisah²kan dengan perdjjuangan untuk kemerdekaan. Ini berarti bahwa sikap itu di-ambil dengan sudah mempertimbangkan jang masak², mempertimbangkan untung rugi bagi kaum buruh kereta-api, untung rugi bagi golongan² rakjat lainja, untung rugi bagi perkembangan djawatan, untung rugi bagi Republik Indonesia.”¹⁸

Posisi tersebut nampaknya letak SBKA dalam mengkondisikan untuk meraih perbaikan sosial.

“Perubahan² baru jang menguntungkan Rakjat tidak datang dengan sendirinja dari bulan dan bintang, perubahan² ini hanja dapat diwujudkan melalui perdjjuangan dan penggalangan persatuan jang terus menerus dikalangan kaum buruh dan Rakjat.”¹⁹

Meskipun hal ini belum menjawab bentuk tatanan masyarakat yang diidamkan/dibayangkan: kapitalistik atau sosialistik. Sementara itu, pada waktu itu SBKA pun menolak dikaitkan dengan ideologi komunisme, meskipun dalam aktivitas politik mereka mendukung PKI.

>>><<<

¹⁸ Soepardi, “Pemogokan Jang Wadjar,” Tadjukrentjana *Suara SBKA*, no. 40, thn. V Pebruari 1956, hal. 3.

¹⁹ Njono (Sekretaris Djendral Dewan Nasional SOBISI), “Djadikan tahun 1956, tahun jang membawa perubahan² baru bagi Rakjat,” *Suara SBKA*, no. 39, thn. V Djanuari 1956, hal. 7.

Yayasan Penebar adalah institusi nir-laba independen. Kami berharap saudara/i (individu) maupun organisasi bersedia mendukung aktivitas kami. Kami menerima donasi, hibah dan dukungan tak mengikat dalam bentuk apapun. Bila saudara/i bermaksud mendukung kami dengan mendonasikan uang, rekening bank kami adalah: BCA (Cabang Cimanggis), rekening Tahapan BCA, nomor account: 166 1746276.